

OPTIMALISASI PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI PADA SMART DEFENSE GUNA Mendukung Tugas Pokok TNI AL DALAM RANGKA MELAKSANAKAN FUNGSI PERTAHANAN ASPEK LAUT DI IBU KOTA NEGARA

Permana Silitonga¹, Eko Arie Kurniawan², Hari Wiwit W³
Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut, Indonesia
permanansilto@gmail.com

Submitted: 10th January 2023/ **Edited:** 06th April 2023/ **Issued:** 01st July 2023

Cited on: Silitonga, P., Kurniawan, E. A., & Wiwit W, H. (2023).

OPTIMALISASI PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI PADA SMART DEFENSE GUNA Mendukung Tugas Pokok TNI AL DALAM RANGKA MELAKSANAKAN FUNGSI PERTAHANAN ASPEK LAUT DI IBU KOTA NEGARA. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 6(3), 689-699.

ABSTRACT

Information technology is the most important element of an organization that needs to be and continues to be developed as an effort to increase professionalism to produce a world-class military capable of overcoming problems or responding to challenges and threats in the modern era. The National Capital City (IKN) is in North Penajam Paser Regency, East Kalimantan. Geographically the location is bordered by two countries, namely Malaysia and the Philippines. In addition, on the west side of the island of Borneo is bordered by the territory of Singapore and the South China Sea. The South China Sea conflict which borders the western region of Kalimantan Island will also have a defense and security impact on IKN. Lack of strength in defense and security technology in the Sea Region, the application of Defense, Security, Law Enforcement and Safety at Sea in facing the relocation of the National Capital is a crucial issue that must be faced together. The lack of defense and security forces in the sea area is also the basis for a solution to this problem.

Keywords: Information Technology, Smart Defense, Defense Function

PENDAHULUAN

Pemindahan Ibukota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur adalah persoalan hukum. Status Jakarta sebagai Ibukota negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan beberapa undang-undang lainnya, seperti Undang-undang tentang pemerintahan Daerah. Dengan adanya wacana pemindahan ibukota tentu akan membawa implikasi perpindahan COG bagi Jakarta secara khusus dan negara Indonesia pada umumnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan Ibukota. Artinya eksistensi Ibukota begitu sangat penting dari aspek hukum (Muchamad Taufiq, 2021). Maka

pemerintah harus menyediakan payung hukum tentang pemindahan ibukota serta dampaknya apabila pemindahan ibukota itu dilakukan (Pribadi & Utomo, 2021). Beberapa Aspek yang akan menjadi implikasi pemindahan Ibukota adalah pertahanan dan keamanan, kondisi geografis, keamanan nasional, lingkungan hidup dan pembangunan yang berkelanjutan (Mazda, 2022; Toun, 2018).

Berpindahnya Ibu Kota Negara tidak terlepas dari Pertahanan, Keamanan dan Penegakan Hukum yang akan terjadi baik sebelum, saat dan sesudah berpindahnya Ibu Kota Negara (Herlambang Suryo Putro, 2022), dimana hal tersebut berimplikasi pada Tugas pokok Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) yang merupakan implementasi dari tiga peran universal Angkatan Laut yang meliputi Peran Militer, Peran Konstabulari dan Peran Diplomasi, serta peran tambahan yaitu Peran Dukungan (*benign role*). TNI AL sebagai bagian integral dari TNI, melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan (Peraturan Presiden RI No 66 Tahun 2019).

Berkembangan lingkungan strategis saat ini menuntut TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan pembangunan dan pengembangan kekuatan serta kemampuan dalam rangka penerapan teknologi informasi smart defense guna mendukung tugas pokok TNI AL dalam rangka melaksanakan fungsi pertahanan negara di laut (Kusuma, et al., 2021). Sumber Daya manusia (SDM) merupakan faktor utama dalam sebuah organisasi atau institusi (Chaerudin, et al., 2020), maju atau mundurnya organisasi tersebut ditentukan SDM Pengawaknya (Ichsan, et al., 2021). TNI AL sebagai salah satu institusi perlu memiliki SDM yang berkualitas atau unggul (Notoatmodjo, 2009).

Di tengah kemajuan teknologi informasi yang pesat, kemampuan teknologi informasi TNI/ TNI Angkatan Laut saat ini belum memadai, serta penerapannya yang masih belum secara luas dan merata. Teknologi informasi merupakan elemen terpenting dari sebuah organisasi yang perlu dan terus dikembangkan sebagai upaya meningkatkan profesionalisme untuk menghasilkan militer berkelas dunia yang mampu mengatasi permasalahan atau menjawab tantangan dan ancaman di era modern (Priyatna, et al., 2020). Untuk mewujudkan prajurit TNI Angkatan Laut yang profesional, modern dan tangguh tersebut maka dilaksanakan dengan program peningkatan profesionalisme personel TNI AL terutama dalam hal teknologi yang bertujuan mengoptimalkan peran (Kasenda, et al., 2020; Wijanarka & Musani, 2022), tugas dan fungsi TNI Angkatan Laut secara tepat serta melaksanakan pembenahan administrasi maupun penataan

organisasi secara menyeluruh, konsisten dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan visi dan misi TNI serta ikut berpartisipasi dalam menciptakan sistem pertahanan negara di laut berdasarkan teknologi smart defense yang dilaksanakan secara konseptual, gradual dan konstitusional yang meliputi aspek doktrin, struktur dan kultur serta mindset.

Salah satu bidang yang perlu mendapat perhatian khusus adalah penataan sistem manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM prajurit TNI Angkatan Laut yang didukung oleh sistem berbasis kompetensi (Hayati & Yulianto, 2021), transparan serta bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan. Dalam penulisan kertas karya acuan ini membahas tentang Pemecahan Masalah Optimalisasi Penerapan Teknologi smart defense Guna Mendukung Tugas Pokok TNI AL Dalam Rangka Melaksanakan Fungsi Pertahanan Aspek Laut di Ibukota Negara sehingga dapat memberikan gambaran dan sumbangsih pemikiran bagi pimpinan TNI Angkatan Laut sehingga didapatkan pola pikir, pola sikap dan pola tindak yang sama dalam pelaksanaannya (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2014).

LANDASAN TEORI

Undang Undang No. 34 tahun 2004

Undang Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pada pasal 9 secara khusus membahas tentang tugas dari TNI Angkatan Laut antara lain : Melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan; Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi; Melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah; melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut; serta melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut (Undang Undang No. 34 Tahun 2004).

Undang Undang No. 32 tahun 2014

Undang Undang No. 32 tahun 2014 tentang kelautan pada Bab IX mengenai Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum, Dan Keselamatan di Laut pada Pasal 58 berbunyi: (1) Untuk mengelola kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara di wilayah Laut, dibentuk sistem pertahanan laut; (2) Sistem pertahanan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia; (3) Sistem pertahanan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pada Pasal 59 berbunyi: (1) Penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia, dasar Laut, dan tanah di bawahnya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta sanksi atas pelanggaran dilaksanakn sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional; (2) Yurisdiksi dalam penegakan kedaulatan dan hukum terhadap kapal asing yang sedang melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional; (3) Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut (Undang Undang No. 32 Tahun 2014).

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Sukmadinata (2017), metode kualitatif adalah penelitian untuk mendiskripsikan dan menganalisis tentang fenomena, peristiwa, kepercayaan, sikap, dan aktivitas sosial secara individual maupun kelompok. Metode kualitatif merupakan kumpulan metode untuk menganalisis dan memahami lebih dalam mengenai makna beberapa individu maupun kelompok dianggap sebagai masalah kemanusiaan atau masalah sosial Creswell (2018). Penelitian kualitatif ini menggunakan metode penelitian eksplorasi, eksplorasi merupakan jenis penelitian awal dari suatu penelitian yang sifatnya sangat luas. Dalam penelitian eksplorasi menjadi sangat penting dikarenakan akan menghasilkan landasan yang kuat bagi penelitian selanjutnya.

HASIL PENELITIAN

Untuk memperkuat teknologi pertahanan maka TNI AL dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Elektronika Angkatan Laut (Diskomlekal) perlu membangun kerjasama dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Kerjasama ini menjadi momentum, baik bagi Ditjen SDPPI maupun TNI Angkatan Laut, untuk bersinergi mewujudkan kesiapan Indonesia menghadapi peperangan di dunia elektronika.

Kerjasama ini dilakukan sebagai upaya TNI AL beserta institusi pemerintah dalam menghadapi ancaman, sekaligus penguatan pertahanan negara yang pada saat ini sudah berpindah ke dunia elektronik dimana hal tersebut juga sebagai bentuk antisipasi Indonesia terhadap negara-negara di dunia yang saat ini telah menyiapkan infrastruktur dan SDM dalam mendukung peperangan era modern. Dengan kerjasama ini, kedua Institusi akan saling melengkapi dalam bidang spektrum monitoring untuk saling meningkatkan kualitas pertahanan aspek laut menjadi suatu sistem smart defense yang mumpuni.

Dalam bidang personel perlu adanya kerjasama yang mencakup melibatkan personel dan peralatan yang dimiliki pemerintah dengan TNI AL dalam pengumpulan informasi, pengukuran sumber daya untuk menunjang kepentingan TNI Angkatan Laut saat situasi darurat, penertiban penggunaan frekuensi ilegal yang mengganggu komunikasi, serta pembinaan dan penertiban penggunaan frekuensi radio.

Dalam rangka peningkatan kekuatan Pertahanan dan Keamanan TNI AL dapat bekerjasama dengan industri dalam negeri sebagai upaya untuk mewujudkan kemandirian Indonesia dalam bidang teknologi pertahanan, dalam perwujudan alutsista berbasis teknologi terbaru yang dapat menunjang perwujudan smart defense maka PT Len Industri telah memiliki hasil pengembangan berbagai produk lini pertahanan mulai dari Sistem Command & Control (C2), Sistem Sensor, dan Sistem Komunikasi. Pengembangan akan didorong ke arah brainware atau software sesuai dengan karakteristik kebutuhan alutsista TNI yang mementingkan perangkat lunak untuk menjaga keamanan dan keselamatan data – data maupun informasi strategis negara.

Wilayah yang menjadi rencana Ibukota baru atau yang disebut Ibu Kota Nusantara (IKN) secara geografis terletak di pulau Kalimantan. Meliputi wilayah daratan seluas

kurang lebih 256.142 ha (dua ratus lima puluh enam ribu seratus empat puluh dua hektare) dan wilayah perairan laut seluas kurang lebih 68.189 ha (enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh sembilan hektare) (Undang – undang RI No. 3 tahun 2022).

Ibu kota tidak cukup hanya persiapan fisik, harus sudah melalui proses kajian holistik dan menyeluruh. Termasuk aspek pertahanan, keamanan, dan faktor-faktor strategis esensial lainnya dilihat dari kondisi geografis IKN tersebut. Paling penting adalah aspek pertahanan untuk mencegah agar pemindahan tersebut tidak disusupi kepentingan atau masuknya militer asing ke Indonesia. Kedudukan Kementerian Pertahanan yang berfungsi sebagai perumusan dan pelaksanaan kebijakan pelaksanaan teknis di bidang informasi pertahanan memegang peranan cukup penting dalam perang informasi di era damai seperti saat ini. Kekuatan pertahanan nirmiliter khususnya dalam ranah siber dibangun berdasarkan diktum upaya pembelaan negara, yang secara konseptual kekuatannya diserahkan kepada Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian di luar bidang pertahanan, yaitu Kementerian Kominfo sebagai unsur utama dan Kementerian Pertahanan sebagai salah satu unsur dukungan bersama kekuatan bangsa lainnya (Permenhan RI No.82 tahun 2014)

Diperlukan percepatan pengolahan informasi yang didukung dengan tenaga-tenaga yang mampu merespon setiap kejadian atau informasi yang berkembang di segala aspek kehidupan masyarakat saat ini. Dari segi pertahanan aspek laut maka peran TNI AL sangat dominan dimana sistem pertahanan saat ini sudah menggunakan basis smart defense dimana antara alutsista yang melaksanakan pertahanan di laut sudah terintegrasi data internal dan eksternal dalam jaringan komunikasi data(komta) yang terdiri dari data internal strategi pertahanan (Strahan) perencanaan pertahanan (Renhan), kekuatan pertahanan (Kuathan), potensi pertahanan (Pothan), dan sarana pertahanan (Ranahan) serta terintegrasi pula dengan data eksternal yang berasal dari Mabes TNI AL.

Indikator yang terkait dalam perspektif keamanan laut adalah indeks kestabilan keamanan laut, indeks bahaya pelayaran, dan indeks pembangunan kemaritiman. Sedangkan dalam perspektif pertahanan, sebuah ibu kota harus mempertimbangkan posisi geografis dan infrastruktur pertahanan ibu kota baru sehingga tidak rentan dari serangan eksternal maupun bencana alam. Indikator yang mengukur pertahanan adalah indeks rawan bencana, global firepower index, dan global cybersecurity index. Sebagai

pusat pemerintahan, ibu kota baru ini harus disiapkan sedemikian rupa agar mampu menghadapi dua jenis ancaman, yakni: Ancaman Tradisional dan ancaman non-tradisional. Adapun Ancaman Tradisional itu berupa ancaman militer dari aktor negara yang ingin mengganggu, mengancam, atau merusak kesatuan serta kedaulatan NKRI; sementara Ancaman Non-Tradisional, yakni ancaman dari aktor non-negara berupa teror, perampokan, kriminalitas, penyelundupan obat-obatan terlarang dan lainnya yang dapat menimbulkan rasa tidak aman di tengah masyarakat. Untuk menghadapi ancaman tradisional, ibu kota pemerintahan perlu dilengkapi dengan peralatan dan pasukan militer yang memadai. Aparat yang memadai juga diperlukan untuk melindungi dan memastikan keamanan.

Melihat dari posisinya sendiri Ibukota Baru ini terletak di posisi strategis yang hanya dikelilingi oleh daratan saja dan keterbatasan wilayah laut disekitarnya. Namun pemilihan Kota Nusantara yang berada di antara Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara telah memiliki lima alasan, yakni: Risiko bencana alam seperti gempa, banjir, tsunami, kebakaran, relatif lebih rendah dari daerah lain. Lokasi Kota Nusantara berada di tengah-tengah Indonesia. Bakal Kota Nusantara berada di dekat wilayah perkotaan yang berkembang, yaitu Balikpapan dan Samarinda. Kalimantan Timur memiliki infrastruktur yang relatif lengkap. Tersedia lahan seluas 180 ribu hektare yang dikuasai pemerintah.

Penerapan keamanan dalam pelayaran menjadi gambaran mengenai kondisi keamanan wilayah laut khususnya di wilayah sekitar IKN yang berbatasan dengan wilayah Filipina yang sampai saat ini masih terdapat kelompok separatis yang sewaktu-waktu dapat membahayakan keamanan pelayaran. Peningkatan patroli wilayah laut dapat dilaksanakan untuk memberikan peningkatan keamanan wilayah laut. Melihat kepada beberapa tahun kebelakang pernah terjadi perompakan terhadap kapal-kapal Indonesia di wilayah Laut Filipina, tentunya peristiwa ini memberikan gambaran adanya ancaman yang nyata terhadap keamanan di wilayah laut sekitar Ibu Kota Negara. Dalam pelaksanaan penjagaan wilayah laut yang sangat luas, Indonesia memiliki tujuh lembaga penegak hukum yang memiliki satgas patroli di laut. Lembaga penegak hukum tersebut diantaranya adalah TNI Angkatan Laut; Polri-Direktorat Kepolisian Perairan; Kementerian Perhubungan-Direktorat Hubla; Kementerian Kelautan dan Perikanan-Direktorat PSDKP; Kementerian Keuangan-Direktorat Bea Cukai; Bakamla dan

Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara illegal (Satgas 115). Ke-tujuh lembaga penegak hukum tersebut melaksanakan patroli terkait dengan keamanan dilaut yang saling bekerjasama dengan TNI AL sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan masing-masing. Makmur Keliat dalam Suproboningrum & Kurniawan (2018) menyebutkan bahwa keamanan maritim dapat ditingkatkan dengan pelaksanaan peningkatan kekuatan patroli di wilayah laut baik perairan terbuka maupun perairan tertutup.

Peningkatan patroli dapat dilakukan juga sebagai sebuah upaya dalam penegakan hukum di wilayah laut. Penegakan hukum lebih jauh dapat memberikan keamanan wilayah laut yang positif. Tentunya patroli wilayah laut harus didukung dengan armada pertahanan dan keamanan laut yang cukup baik. Berbagai masalah dan kendala dalam penegakan hukum dilaut secara garis besar adalah kurangnya armada yang cukup dalam pelaksanaan pemantauan terhadap pelanggaran pelanggaran yang terjadi di wilayah laut. Tanjung (2020) menyebutkan kendala-kendala tersebut terjadi hampir disemua aspek dari kegiatan penegakan hukum, dimulai dari kegiatan pemantauan sampai kepada kegiatan penuntutan dan penahanan para tersangka pelaku kegiatan terlarang.

Dengan adanya tuntutan pelaksanaan tugas TNI AL dalam pengamanan wilayah laut di IKN tersebut maka diperlukan suatu sistem yang dapat bekerja serta mempermudah pelaksanaan pengamanan wilayah laut tersebut. TNI AL perlu menggunakan sistem pertahanan yang berbasis teknologi smart defense untuk memperkuat sistem pertahanan yang ada saat ini. Cara kerja smart defense adalah memanfaatkan sebuah informasi dari KRI yang berpatroli di laut yang telah dibekali bahasa pemrograman yang telah tersusun. Dimana, setiap informasi yang terbentuk akan menghasilkan sebuah data yang akan membantu perangkat data sistem informasi yang ada di satuan kerja terkait dalam melakukan fungsi atau kerja. Faktor terpenting dari jalannya program tersebut terletak pada jaringan internet yang menjadi penghubung antar sistem dan perangkat keras. Tugas utama dari personel TNI AL adalah menjadi pengawas untuk memonitoring setiap tindakan dari mesin saat bekerja.

Meskipun wilayah Ibu Kota Negara berada di tengah hiruk pikuk kota, Penerapan Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum dan Keselamatan di Laut tetap perlu dilakukan. Hal ini dikarenakan dengan adanya perbatasan langsung antara perairan Indonesia dengan perairan negara-negara tersebut berpotensi menimbulkan konflik, dan

dikatakan saat ini sekitar dua belas pulau wilayah Indonesia yang memiliki masalah-masalah perbatasan yaitu Pulau Nipah yang berbatasan dengan Singapura; Pulau Sekatung dengan Vietnam; Pulau Mamore, Miangas, dan Pulau Marampit dengan Filipina; Pulau Beras, Fani, Fanilda dengan Republik Palau (sebelah utara Irian); Pulau Bate berbatasan dengan Timor Leste; Pulau Rondo dengan India; Pulau Dana dengan Australia. Persoalan lainnya Pulau Pasir dideklarasikan oleh Australia sebagai miliknya.

Gambaran konflik tersebut menunjukkan perlunya peningkatan kekuatan armada laut di sekitar Ibu Kota Negara. Perlunya peningkatan kekuatan armada laut untuk menghadapi konflik yang terjadi tersebut. Suharyo (2019) menyebutkan konsepsi keamanan maritim yang merujuk pada PBB diantaranya menyangkut: pembajakan dan perompakan; terorisme maritim; peredaran senjata ilegal; perdagangan manusia; imigran gelap; dan pencurian ikan. Tentunya untuk menghadapi seluruh persoalan tersebut diperlukan kekuatan armada yang cukup guna mendukung Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum dan Keselamatan di Laut dalam menghadapi perpindahan Ibu Kota Negara (Suharyo, 2019).

Peningkatan kemampuan alutsista TNI AL menuntut personel yang unggul, gagasan-gagasan cerdas yang kreatif dan inovatif, sekaligus peralatan yang modern yang secara keseluruhan memerlukan keterpaduan dukungan ekonomi negara yang kuat serta industri pertahanan dalam negeri yang kuat dengan didukung oleh kemampuan penelitian dan pengembangan (litbang) dalam negeri yang mumpuni. Sistem pertahanan harus didukung oleh sistem yang mampu memadukan teknologi sensor dan teknologi informasi dan komunikatif untuk mampu menangkap dan melakukan analisa data yang diperlukan dalam mengolah informasi yang diterima dari satuan TNI AL di medan tugas guna mengungkap informasi strategis yang dimiliki oleh musuh atau bakal lawan, yang kemudian diperlukan dalam pengambilan keputusan selanjutnya oleh pimpinan yang berwenang. Secara keseluruhan alutsista yang sudah dibekali teknologi ini menjadi semacam “*smart defense*” dari medan operasi perang yang mengandalkan teknologi/sistem manajemen informasi/komunikasi dan sensor-sensor guna meningkatkan kemampuan daya gentarnya.

Prajurit TNI dituntut untuk mampu mengetahui dan mengoperasikan Alutsista dengan teknologi canggih untuk melaksanakan tugas dan operasi yang dilaksanakan TNI Angkatan Laut. Tugas dan operasi tersebut dapat berjalan dengan lancar dan

maksimal manakala didukung dengan sumberdaya manusia yang memiliki profesionalisme tinggi dan komposisi serta jumlah yang sesuai dengan pos-pos tempur yang ada dalam Alutsista tersebut. Saat ini pemenuhan personel pengawak KRI dan Alutsista lainnya masih jauh dari DSP yang dipersyaratkan. Masih banyak kekosongan pos-pos tempur pada KRI maupun Alutsista lainnya sehingga pelaksanaan tugas dan operasi masih berjalan kurang optimal. Untuk itu perlu dilakukan proses perencanaan yang baik terkait kebutuhan personel pengawakan Alutsista terutama KRI.

KESIMPULAN

Perpindahan Ibu Kota Negara memberikan dampak terhadap Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum dan Keselamatan di Laut khususnya di sekitar wilayah Ibu Kota Negara. Dimana dengan letak yang strategis tersebut mengharuskan dibuatkannya suatu sistem smart defense yang saling terintegrasi antara kementerian lembaga dengan TNI AL sebagai pelaksana tugas pengamanan aspek laut di IKN.

Peningkatan kekuatan Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum dan Keselamatan di Laut dapat dilakukan dengan melakukan peningkatan terhadap patroli wilayah laut yang dapat dilakukan melalui kerjasama antara TNI AL dengan 6 lembaga lainnya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kesiapan armada dan personel disekitar wilayah Ibu Kota Negara dapat memberikan pengaruh positif terhadap Pertahanan, Keamanan,

DAFTAR PUSTAKA

- Chaerudin, A., Rani, I. H., & Alicia, V. (2020). *Sumber daya manusia: pilar utama kegiatan operasional organisasi*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Creswell, D. (2018). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Hayati, N., & Yulianto, E. (2021). Efektivitas Pelatihan Dalam Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia. *Journal Civics and Social Studies*, 5(1), 98-115.
- Herlambang Suryo Putro, S. (2022). Peran Tni AL Dalam Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum Dan Keselamatan Di Laut Guna Mendukung Perpindahan Ibu Kota Negara Dalam Rangka Mewujudkan Poros Maritim Dunia. *Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal)*, 10(2), 118-131.
- Ichsan, R. N., SE, M., Lukman Nasution, S. E. I., & Sarman Sinaga, S. E. (2021). *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri.

- Kasenda, G. I. F., Djati, S. P., & Suprpto, S. (2020). Analisis Profesionalisme Prajurit TNI Angkatan Laut Dalam Mendukung Pertahanan Negara di Komando Armada I. *Manajemen Pertahanan: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Manajemen Pertahanan*, 6(2).
- Kusuma, A. W., Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2021). Relevansi Strategi Pertahanan Laut Berdasarkan Doktrin Jalesveva Jayamahe Terhadap Globalisasi Dan Perkembangan Lingkungan Strategis. *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*, 6(1).
- Mazda, C. N. (2022). Analisis Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Terhadap Social Security. *Jurnal Enersia Publika: Energi, Sosial, dan Administrasi Publik*, 6(1), 1-12.
- Muchamad Taufiq, S. H. (2021). *Aspek hukum dalam ekonomi*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Pribadi, D. S., & Utomo, S. (2021). Dampak Perpindahan Ibu Kota Negara terhadap Pemulihan Ekonomi dalam Perspektif Persaingan Usaha. *Jurnal Persaingan Usaha*, 1(2), 27-42.
- Priyatna, C. C., Prastowo, F. A. A., Syuderajat, F., & Sani, A. (2020). Optimalisasi teknologi informasi oleh lembaga pemerintah dalam aktivitas komunikasi publik. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 8(1), 114-127.
- Suharyo, S. (2019). Penegakan Keamanan Maritim dalam NKRI dan Problematikanya. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(3), 285-302.
- Sukmadinata, Nana S. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Suproboningrum, L., & Kurniawan, Y. (2018). Diplomasi Maritim dalam Keberhasilan Patroli Terkoordinasi Indonesia-Malaysia-Singapura Di Selat Malaka. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 8(2).
- Tanjung, A. P. (2020). Pengaruh Kemampuan Operasi Keamanan Laut Pangkalan TNI Angkatan Laut Terhadap Penegakan Hukum di Laut. *Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal)*, 8(1).
- Toun, N. R. (2018). Analisis Kesiapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam Wacana Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia ke Kota Palangkaraya. *Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik*, 1(01), 129-148.
- Wijanarka, D., & Musani, I. (2022). Manajemen Sumber Daya Manusia Guna Meningkatkan Kemampuan Tni Angkatan Laut Indonesia Yang Modern Di Revolusi Industri 4.0. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(3), 494-501.